

**Judul** : Ganjil Genap di Depok Komisi V DPR Minta Tak Picu Penambahan Kendaraan Pribadi  
**Tanggal** : Senin, 10 September 2018  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 10

## GANJIL GENAP DI DEPOK

# Komisi V DPR Minta Tak Picu Penambahan Kendaraan Pribadi

**DEPOK** - Anggota Komisi V DPR Intan Fauzi menyarankan agar penerapan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap di Jalan Margonda Raya setiap akhir pekan oleh Pemerintah Kota Depok tidak memicu masyarakat menambah kepemilikan mobil pribadi.

Intan Fauzi menilai wacana tersebut hanya solusi jangka pendek saja untuk mengatasi kemacetan di Depok. Dia mengakui sistem ini terbukti ampuh mengurai kemacetan di Jakarta ketika perhelatan Asian Games lalu. Namun, yang harus dipikirkan adalah solusi jangka panjangnya.

"Itu hanya sebagai rekayasa lalu lintas saja. Saat ini pertumbuhan penduduk dan pemilik kendaraan jauh lebih besar dibandingkan ruas jalan sehingga diwacanakan ganjil genap. Tapi, jangan sampai ini malah membuat warga membeli kendaraan lebih dari satu

karena tidak mau kena sistem ini," katanya.

Menurutnya pemerintah kota harus melakukan pemerataan pembangunan. Seperti dengan mempercepat proyek Margonda II yang salah satu titik nya adalah kawasan Bojong Sari. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dan roda perputaran uang tidak hanya terpusat di Margonda dan secara otomatis kemacetan juga terurai. "Margonda II ada enam titik. Jika itu dikembangkan, kemacetan di Margonda tidak lagi signifikan. Jadi, solusi jangka panjangnya adalah pemerataan pembangunan," katanya.

Dia juga mengingatkan agar tidak lagi dikeluarkan perizinan di kawasan Margonda. Jika ada investor yang mau melakukan pembangunan, sebaiknya diarahkan ke wilayah lain di Depok. Sebab jika perizinan yang dikeluarkan hanya sebatas di kawasan

Margonda, kawasan lainnya tidak akan berkembang. "Pusat kota tidak boleh hanya satu titik. Harus dibangun titik-titik lain yang juga dekat dengan warga sehingga akses mereka pun menjadi mudah dan perekonomian berkembang," tuturnya.

Dinas Perhubungan Kota Depok tengah melakukan kajian atas wacana itu. Kajian dimulai pada Agustus dan ditarget selesai satu bulan, tapi hingga kini kajian tersebut belum juga selesai. "Belum final. Ini masih tahap kroscek ulang. Masih banyak tahapan. Masih belum paparan ekspos internal," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana, kemarin.

Dia mengklaim sejauh ini tidak ada kendala apa pun. "Tidak ada kendala. Memang belum selesai saja kajiannya," ungkapnya.

**ratna purnama**